

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 60 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA, PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**A. CONTOH PERATURAN DESA TENTANG APB DESA**



---

KEPALA DESA .....  
KABUPATEN .....

PERATURAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN.....

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ....., (nama desa, huruf kapital semua)

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawatan Desa;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
- 16. *Peraturan yang terkait .....*

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....(nama desa, huruf kapital semua)  
dan  
KEPALA DESA ..... (nama desa, huruf kapital semua)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA TAHUN ANGGARAN.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Pendapatan Desa                          | Rp.....        |
| 2. Belanja Desa                             |                |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa   | Rp.....        |
| b. Bidang Pembangunan                       | Rp.....        |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan          | Rp.....        |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat           | Rp.....        |
| e. Bidang Tak Terduga                       | Rp.....        |
| Jumlah Belanja <b>(a+b+c+d)</b>             | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/Defisit <b>(Pendapatan-Belanja)</b> | <u>Rp.....</u> |
|   |                |
| 3. Pembiayaan Desa                          |                |
| a. Penerimaan Pembiayaan                    | Rp.....        |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                   | Rp.....        |
| Jumlah Pembiayaan <b>(a - b)</b>            | <u>Rp.....</u> |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Desa .....

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

KEPALA DESA .....

.....

Diundangkan di .....

pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA .....

.....

LEMBARAN DESA ..... TAHUN ..... NOMOR .....

LAMPIRAN PERATURAN DESA .....

NOMOR : ..... TAHUN .....

TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN ....

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .....  
TAHUN ANGGARAN .....

KODE REKENING						URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1						2	3	4
1						PENDAPATAN DESA		
1	1					Pendapatan Asli Desa		
1	1	1				Hasil Usaha		
1	1	1	1			Hasil Badan Usaha Milik Desa		
1	1	1	2			Hasil Badan Usaha Milik Desa Bersama		
1	1	1	3			Lain-lain Hasil Usaha Desa		
1	1	2				Hasil Aset		
1	1	2	1			Hasil Tanah Milik Desa		
1	1	2	2			Hasil Pasar Desa		
1	1	2	3			Hasil Pasar Hewan		
1	1	2	4			Hasil Tambatan Perahu		
1	1	2	5			Hasil Bangunan Desa		

1	1	2	6			Hasil Pelelangan Ikan		
1	1	2	7			Hasil Pelelangan Hasil Pertanian/Perkebunan/Perikanan/Peternakan		
1	1	2	8			Hasil Hutan Desa		
1	1	2	9			Hasil Mata Air Desa		
1	1	2	10			Hasil Pemandian Umum		
1	1	2	11			Hasil Lapangan Desa		
1	1	2	12			Hasil Jaringan Irigasi		
1	1	2	13			Lain-lain Hasil Aset Desa		
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong</b>		
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>Pendapatan Asli Desa yang sah lainnya</b>		
1	1	4	1			Pungutan Desa		
1	1	4	2			Hasil Tanah Kas Desa dari Hak Anggaduh		
1	1	4	3			Hasil/Bagi Hasil Sewa Pelungguh		
1	1	4	4			Hasil/Bagi Hasil Sewa Pengareman-Arem		
1	1	4	5			Bunga Bank Hasil Pelepasan Tanah dari Hak Anggaduh		
1	1	4	6			Bunga Bank dari Rekening Kas Desa dan Hasil Pelepasan Tanah Milik Desa		
1	1	4	7			Bunga Bank Pembentukan Dana Cadangan		
1	1	4	8			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
<b>1</b>	<b>2</b>					<b>Pendapatan Transfer</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>Dana Desa</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>Bagi Hasil</b>		

1	2	2	1			Bagi Hasil Pajak Daerah		
1	2	2	2			Bagi Hasil Retribusi Daerah		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>Alokasi Dana Desa</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>				<b>Bantuan Keuangan</b>		
1	2	4	1			Bantuan Keuangan DIY		
1	2	4	1	1		Bantuan Keuangan Umum		
1	2	4	1	2		Bantuan Keuangan Khusus		
1	2	4	2			Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah		
1	2	4	2	1		Bantuan Keuangan Umum		
1	2	4	2	2		Bantuan Keuangan Khusus		
<b>1</b>	<b>3</b>					<b>Pendapatan Lain-lain</b>		
1	3	1				Hibah dan Sumbangan dari Pihak ketiga yang tidak mengikat		
1	3	2				Hasil kerjasama dengan pihak ketiga		
1	3	3				Bantuan dari perusahaan yang berlokasi di Desa		
1	3	4				Pengembalian kelebihan belanja		
1	3	5				Pengembalian tuntutan ganti rugi		
1	3	6				Pendapatan hadiah		
1	3	7				Hasil pelepasan tanah dari Hak Anggaduh		
1	3	8				Hasil pelepasan tanah milik Desa		
1	3	9				Hasil pelepasan aset Desa selain tanah		
1	3	10				Lain-lain Pendapatan Desa		

						<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		
<b>2</b>						<b>BELANJA</b>		
<b>2</b>	<b>1</b>					<b><i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i></b>		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b><i>Kegiatan Pembayaran Penghasilan dan Tunjangan</i></b>		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b><i>Belanja Pegawai</i></b>		
2	1	1	1	1		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2	1	1	1	2		Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangkopek		
2	1	1	1	3		Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2	1	1	1	4		Tunjangan Suami/Istri		
2	1	1	1	5		Tunjangan Anak		
2	1	1	1	6		Tunjangan Kesehatan		
2	1	1	1	7		Tunjangan Penjabat Kepala Desa		
2	1	1	1	8		Tunjangan Pelaksana Tugas Harian Perangkat Desa		
2	1	1	1	9		Tunjangan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2	1	1	1	10		Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2	1	1	1	11		Jaminan Hari Tua Eks Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangkopek		
2	1	1	1	12		Santunan Kecelakaan/Kematian		
2	1	1	1	13		Santunan Duka		



2	1	1	1	14		Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa		
2	1	1	1	15		Penghargaan Purna Tugas Badan Permusyawaratan Desa		
2	1	1	1	16		Honorarium Bendahara Desa		
2	1	1	1	17		Honorarium Pembantu Bendahara Desa		
2	1	1	1	18		Honorarium Petugas Pengelola Aset Desa		
2	1	1	1	19		Honorarium Petugas Pemungut		
2	1	1	1	20		Honorarium Petugas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum		
2	1	1	1	21		Honorarium Tenaga Honorer Desa		
2	1	1	1	22		Lain-lain Belanja Pegawai		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>Kegiatan Operasional Perkantoran Pemerintah Desa</b>		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
2	1	2	2	1		Belanja Listrik/Air/Telepon/Surat Kabar/Fax/Internet (Jasa)		
2	1	2	2	2		Belanja Pajak Bumi dan Bangunan/Kendaraan Bermotor (Aset)		
2	1	2	2	3		Belanja Alat Tulis Kantor		
2	1	2	2	4		Belanja Benda Pos dan Materai		
2	1	2	2	5		Belanja Fotocopy/Cetak/Jilid/Penggandaan/rental		
2	1	2	2	6		Belanja Makanan dan Minuman		
2	1	2	2	7		Belanja Pakaian Dinas		
2	1	2	2	8		Belanja Bahan dan Material		
2	1	2	2	9		Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih		
2	1	2	2	10		Belanja Alat Kelistrikan, Baterai, dan Lampu		

2	1	2	2	11		Belanja Papan Informasi		
2	1	2	2	12		Belanja Sewa Pakaian		
2	1	2	2	13		Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan/Kendaraan		
2	1	2	2	14		Belanja Sewa Gedung/Tanah/Tempat/Ruangan		
2	1	2	2	15		Belanja Pemeliharaan/Servis/suku cadang Kendaraan Bermotor		
2	1	2	2	16		Belanja Pemeliharaan/servis Perlengkapan/Peralatan Kantor dan Rumah Tangga		
2	1	2	2	17		Belanja Pemeliharaan Bangunan/Taman/Sarana Prasarana Desa		
2	1	2	2	18		Belanja Honorarium Tim/Panitia		
2	1	2	2	19		Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Narasumber		
2	1	2	2	20		Belanja Transport peserta pembinaan/sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan		
2	1	2	2	21		Belanja uang saku pengiriman/penugasan Non Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2	1	2	2	22		Belanja Uang Sidang Badan Permusyawaratan Desa		
2	1	2	2	23		Belanja Upah Tenaga Kerja		
2	1	2	2	24		Belanja Perjalanan Dinas		
2	1	2	2	25		Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat		
2	1	2	2	26		Belanja Jasa Sertifikasi		
2	1	2	2	27		Belanja Jasa Paket/Pengiriman		
2	1	2	2	28		Belanja Jasa Dekorasi dan Dokumentasi		
2	1	2	2	29		Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Bank)		

2	1	2	2	30		Belanja Jasa Pihak Ketiga		
2	1	2	2	31		Belanja BBM dan Gas		
2	1	2	2	32		Lain-lain Belanja Barang dan Jasa		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b><i>Belanja Modal</i></b>		
2	1	2	3	1		Belanja Modal Tanah Pengganti		
2	1	2	3	2		Belanja Modal Tanah Bangunan Kantor		
2	1	2	3	3		Belanja Modal Tanah Rumah Dinas		
2	1	2	3	4		Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan		
2	1	2	3	5		Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan		
2	1	2	3	6		Belanja Modal Tanah Sarana Umum		
2	1	2	3	7		Belanja Modal Peralatan Berat		
2	1	2	3	8		Belanja Modal Peralatan Angkutan/Kendaraan		
2	1	2	3	9		Belanja Modal Peralatan Bengkel/Pertukangan		
2	1	2	3	10		Belanja Modal Peralatan Ukur		
2	1	2	3	11		Belanja Modal Peralatan Pertanian/Perkebunan/Perikanan/Peternakan		
2	1	2	3	12		Belanja Modal Peralatan Kantor		
2	1	2	3	13		Belanja Modal Perlengkapan Kantor/Keamanan		
2	1	2	3	14		Belanja Modal Peralatan Rumah Tangga		
2	1	2	3	15		Belanja Modal Peralatan Studio/Audio		
2	1	2	3	16		Belanja Modal Peralatan Komunikasi/Dokumentasi		
2	1	2	3	17		Belanja Modal Peralatan Seni Budaya		
2	1	2	3	18		Belanja Modal Gedung/Bangunan		

2	1	2	3	19		Belanja Modal Jalan Desa		
2	1	2	3	20		Belanja Modal Jembatan Desa/gorong-Gorong		
2	1	2	3	21		Belanja Modal Jaringan Pengairan dan Drainase		
2	1	2	3	22		Belanja Modal Jaringan Air Bersih		
2	1	2	3	23		Belanja Modal Talud/Urap/Bronjong/Bangket		
2	1	2	3	24		Belanja Modal Penerangan		
2	1	2	3	25		Belanja Modal Instalasi Listrik, Internet dan Telepon		
2	1	2	3	26		Belanja Modal Instalasi Pengolah Sampah		
2	1	2	3	27		Belanja Modal Buku dan Kepustakaan		
2	1	2	3	28		Belanja Modal Hewan/Ternak		
2	1	2	3	29		Belanja Modal Tanaman		
2	1	2	3	30		Lain-lain Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Kegiatan Operasional Perkantoran BPD</b>		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
						.....		
						.....		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>Belanja Modal</b>		
						.....		
						.....		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>Kegiatan Operasional Pedukuhan</b>		



2	1	7				Kegiatan .....		
2	1	8				Kegiatan .....		
2	2					Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1				Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Bangunan		
2	2	1	2			Belanja Barang dan Jasa		
						.....		
						.....		
2	2	1	3			Belanja Modal		
						.....		
						.....		
2	2	2				Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor Desa		
2	2	2	2			Belanja Barang dan Jasa		
						.....		
						.....		
2	2	2	3			Belanja Modal		
						.....		
						.....		

2	2	3				Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Balai Desa/Pendopo		
2	2	3	2			Belanja Barang dan Jasa		
						.....		
						.....		
2	2	3	3			Belanja Modal		
						.....		
						.....		
2	2	4				Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Pendukung Kantor Desa		
2	2	4	2			Belanja Barang dan Jasa		
						.....		
						.....		
2	2	4	3			Belanja Modal		
						.....		
						.....		
2	2	5				Kegiatan Pembangunan Obyek Wisata Desa		
2	2	5	2			Belanja Barang dan Jasa		
						.....		
						.....		
2	2	5	3			Belanja Modal		







						.....		
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>			<b>Belanja Modal</b>		
						.....		
						.....		
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>				<b>Kegiatan .....</b>		
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>				<b>Kegiatan .....</b>		
<b>2</b>	<b>4</b>					<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>				<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa</b>		
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
						.....		
						.....		
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>Belanja Modal</b>		
						.....		
						.....		
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>				<b>Kegiatan Pembinaan/Penyuluhan/Sosialisasi bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa</b>		
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		

						.....		
						.....		
2	4	2	3			<b>Belanja Modal</b>		
						.....		
						.....		
2	4	3				<b>Kegiatan pelatihan usaha ekonomi Produktif</b>		
2	4	3	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
						.....		
						.....		
2	4	3	3			<b>Belanja Modal</b>		
						.....		
						.....		
2	4	4				<b>Kegiatan pelatihan usaha pertanian</b>		
2	4	4	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
						.....		
						.....		
2	4	4	3			<b>Belanja Modal</b>		
						.....		
						.....		

2	4	5				<i>Kegiatan pelatihan usaha perikanan</i>		
2	4	5	2			<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		
						.....		
						.....		
2	4	5	3			<i>Belanja Modal</i>		
						.....		
						.....		
2	4	6				<i>Kegiatan .....</i>		
2	4	7				<i>Kegiatan .....</i>		
2	5					<i>Belanja Tidak Terduga</i>		
2	5	1				<i>Kegiatan Penanganan Bencana Alam</i>		
2	5	2				<i>Kegiatan Penanganan Bencana Sosial</i>		
2	5	3				<i>Kegiatan Penanganan Kejadian Luar Biasa/Wabah</i>		
						<b>JUMLAH BELANJA</b>		
						<b>SURPLUS / DEFISIT (Jumlah Pendapatan - Jumlah Belanja)</b>		
3						<b>PEMBIAYAAN</b>		
3	1					<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		

3	1	1				SILPA		
3	1	2				Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3				Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
						<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		
<b>3</b>	<b>2</b>					<b><i>Pengeluaran Pembiayaan</i></b>		
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2				Penyertaan Modal Desa		
						<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		
						<b>SELISIH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		

....., .....

KEPALA DESA .....

(.....)

**B. CONTOH PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB DESA**



KEPALA DESA .....  
KABUPATEN .....

PERATURAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN.....

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ....., (nama desa, huruf kapital semua)

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya keadaan yang menyebabkan terjadinya penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya/kelebihan/kekurangan pendapatan/pergeseran antar jenis anggaran/keadaan darurat/keadaan luar biasa sehingga mengakibatkan harus dilakukannya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Desa..... Nomor ..... Tahun .....;
  - b. bahwa Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawatan Desa;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....(nama desa, huruf kapital semua)  
dan  
KEPALA DESA ..... (nama desa, huruf kapital semua)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... sebelum perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp.....
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
	b. Bidang Pembangunan	Rp.....
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
	e. Bidang Tak Terduga	Rp.....
	Jumlah Belanja <b>(a+b+c+d+e)</b>	Rp.....
	Surplus/Defisit <b>(Pendapatan-Belanja)</b>	Rp.....
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.....
	Selisih Pembiayaan <b>(a-b)</b>	Rp.....



Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... setelah perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		<u>Rp.....</u>
2.	Belanja Desa		
	a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
	b.	Bidang Pembangunan	Rp.....
	c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
	d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
	e.	Bidang Tak Terduga	Rp.....
		Jumlah Belanja <b>(a+b+c+d+e)</b>	<u>Rp.....</u>
		Surplus/Defisit <b>(Pendapatan-Belanja)</b>	<u>Rp.....</u>
3.	Pembiayaan Desa		
	a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
	b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.....
		Selisih Pembiayaan <b>(a-b)</b>	<u>Rp.....</u>

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Desa.....

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

KEPALA DESA .....

.....

Diundangkan di .....

pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA .....

.....

LEMBARAN DESA ..... TAHUN ..... NOMOR .....

LAMPIRAN PERATURAN DESA .....

NOMOR : ..... TAHUN .....

TENTANG : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ....

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .....  
TAHUN ANGGARAN .....

KODE REKENING						URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANG AN
1						2	3	4	5	6
1						PENDAPATAN DESA				
1	1					Pendapatan Asli Desa				
1	1	1				Hasil Usaha				
1	1	1	1			Hasil Badan Usaha Milik Desa				
1	1	1	2			Hasil Badan Usaha Milik Desa Bersama				
1	1	1	3			Lain-lain Hasil Usaha Desa				
1	1	2				Hasil Aset				
1	1	2	1			Hasil Tanah Milik Desa				
1	1	2	2			Hasil Pasar Desa				
1	1	2	3			Hasil Pasar Hewan				

1	1	2	4		Hasil Tambatan Perahu				
1	1	2	5		Hasil Bangunan Desa				
1	1	2	6		Hasil Pelelangan Ikan				
1	1	2	7		Hasil Pelelangan Hasil Pertanian/Perkebunan/Perikanan/Peternakan				
1	1	2	8		Hasil Hutan Desa				
1	1	2	9		Hasil Mata Air Desa				
1	1	2	10		Hasil Pemandian Umum				
1	1	2	11		Hasil Lapangan Desa				
1	1	2	12		Hasil Jaringan Irigasi				
1	1	2	13		Lain-lain Hasil Aset Desa				
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b><i>Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong</i></b>				
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>			<b><i>Pendapatan Asli Desa yang sah lainnya</i></b>				
1	1	4	1		Pungutan Desa				
1	1	4	2		Hasil Tanah Kas Desa dari Hak Anggaduh				
1	1	4	3		Hasil/Bagi Hasil Sewa Pelungguh				
1	1	4	4		Hasil/Bagi Hasil Sewa Pengarem-Arem				
1	1	4	5		Bunga Bank Hasil Pelepasan Tanah dari Hak Anggaduh				
1	1	4	6		Bunga Bank dari Rekening Kas Desa dan Hasil Pelepasan Tanah Milik Desa				
1	1	4	7		Bunga Bank Pembentukan Dana Cadangan				

1	1	4	8			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
<b>1</b>	<b>2</b>					<b>Pendapatan Transfer</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>Dana Desa</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>Bagi Hasil</b>				
1	2	2	1			Bagi Hasil Pajak Daerah				
1	2	2	2			Bagi Hasil Retribusi Daerah				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>Alokasi Dana Desa</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>				<b>Bantuan Keuangan</b>				
1	2	4	1			Bantuan Keuangan DIY				
1	2	4	1	1		Bantuan Keuangan Umum				
1	2	4	1	2		Bantuan Keuangan Khusus				
1	2	4	2			Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah				
1	2	4	2	1		Bantuan Keuangan Umum				
1	2	4	2	2		Bantuan Keuangan Khusus				
<b>1</b>	<b>3</b>					<b>Pendapatan Lain-lain</b>				
1	3	1				Hibah dan Sumbangan dari Pihak ketiga yang tidak mengikat				
1	3	2				Hasil kerjasama dengan pihak ketiga				
1	3	3				Bantuan dari perusahaan yang berlokasi di Desa				
1	3	4				Pengembalian kelebihan belanja				

1	3	5				Pengembalian tuntutan ganti rugi				
1	3	6				Pendapatan hadiah				
1	3	7				Hasil pelepasan tanah dari Hak Anggaduh				
1	3	8				Hasil pelepasan tanah milik Desa				
1	3	9				Hasil pelepasan aset Desa selain tanah				
1	3	10				Lain-lain Pendapatan Desa				
						<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>2</b>						<b>BELANJA</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>					<b><i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i></b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b><i>Kegiatan Pembayaran Penghasilan dan Tunjangan</i></b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b><i>Belanja Pegawai</i></b>				
2	1	1	1	1		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	2		Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangkopek				
2	1	1	1	3		Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	4		Tunjangan Suami/Istri				
2	1	1	1	5		Tunjangan Anak				

2	1	1	1	6	Tunjangan Kesehatan				
2	1	1	1	7	Tunjangan Penjabat Kepala Desa				
2	1	1	1	8	Tunjangan Pelaksana Tugas Harian Perangkat Desa				
2	1	1	1	9	Tunjangan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	10	Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	11	Jaminan Hari Tua Eks Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangkopek				
2	1	1	1	12	Santunan Kecelakaan/Kematian				
2	1	1	1	13	Santunan Duka				
2	1	1	1	14	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa				
2	1	1	1	15	Penghargaan Purna Tugas Badan Permusyawaratan Desa				
2	1	1	1	16	Honorarium Bendahara Desa				
2	1	1	1	17	Honorarium Pembantu Bendahara Desa				
2	1	1	1	18	Honorarium Petugas Pengelola Aset Desa				
2	1	1	1	19	Honorarium Petugas Pemungut				
2	1	1	1	20	Honorarium Petugas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum				
2	1	1	1	21	Honorarium Tenaga Honorir Desa				
2	1	1	1	22	Lain-lain Belanja Pegawai				

<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>Kegiatan Operasional Perkantoran Pemerintah Desa</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
2	1	2	2	1		Belanja Listrik/Air/Telepon/Surat Kabar/Fax/Internet (Jasa)				
2	1	2	2	2		Belanja Pajak Bumi dan Bangunan/Kendaraan Bermotor (Aset)				
2	1	2	2	3		Belanja Alat Tulis Kantor				
2	1	2	2	4		Belanja Benda Pos dan Materai				
2	1	2	2	5		Belanja Fotocopy/Cetak/Jilid/Penggandaan/rental				
2	1	2	2	6		Belanja Makanan dan Minuman				
2	1	2	2	7		Belanja Pakaian Dinas				
2	1	2	2	8		Belanja Bahan dan Material				
2	1	2	2	9		Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih				
2	1	2	2	10		Belanja Alat Kelistrikan, Baterai, dan Lampu				
2	1	2	2	11		Belanja Papan Informasi				
2	1	2	2	12		Belanja Sewa Pakaian				
2	1	2	2	13		Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan/Kendaraan				
2	1	2	2	14		Belanja Sewa Gedung/Tanah/Tempat/Ruangan				
2	1	2	2	15		Belanja Pemeliharaan/Servis/suku cadang Kendaraan Bermotor				



2	1	2	2	16	Belanja Pemeliharaan/servis Perlengkapan/Peralatan Kantor dan Rumah Tangga				
2	1	2	2	17	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Taman/Sarana Prasarana Desa				
2	1	2	2	18	Belanja Honorarium Tim/Panitia				
2	1	2	2	19	Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Narasumber				
2	1	2	2	20	Belanja Transport peserta pembinaan/sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan				
2	1	2	2	21	Belanja uang saku pengiriman/penugasan Non Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	2	2	22	Belanja Uang Sidang Badan Permusyawaratan Desa				
2	1	2	2	23	Belanja Upah Tenaga Kerja				
2	1	2	2	24	Belanja Perjalanan Dinas				
2	1	2	2	25	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat				
2	1	2	2	26	Belanja Jasa Sertifikasi				
2	1	2	2	27	Belanja Jasa Paket/Pengiriman				
2	1	2	2	28	Belanja Jasa Dekorasi dan Dokumentasi				
2	1	2	2	29	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Bank)				
2	1	2	2	30	Belanja Jasa Pihak Ketiga				

2	1	2	2	31	Belanja BBM dan Gas				
2	1	2	2	32	Lain-lain Belanja Barang dan Jasa				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>Belanja Modal</b>				
2	1	2	3	1	Belanja Modal Tanah Pengganti				
2	1	2	3	2	Belanja Modal Tanah Bangunan Kantor				
2	1	2	3	3	Belanja Modal Tanah Rumah Dinas				
2	1	2	3	4	Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan				
2	1	2	3	5	Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan				
2	1	2	3	6	Belanja Modal Tanah Sarana Umum				
2	1	2	3	7	Belanja Modal Peralatan Berat				
2	1	2	3	8	Belanja Modal Peralatan Angkutan/Kendaraan				
2	1	2	3	9	Belanja Modal Peralatan Bengkel/Pertukangan				
2	1	2	3	10	Belanja Modal Peralatan Ukur				
2	1	2	3	11	Belanja Modal Peralatan Pertanian/Perkebunan/Perikanan/Peternakan				
2	1	2	3	12	Belanja Modal Peralatan Kantor				
2	1	2	3	13	Belanja Modal Perlengkapan Kantor/Keamanan				
2	1	2	3	14	Belanja Modal Peralatan Rumah Tangga				
2	1	2	3	15	Belanja Modal Peralatan Studio/Audio				
2	1	2	3	16	Belanja Modal Peralatan Komunikasi/Dokumentasi				
2	1	2	3	17	Belanja Modal Peralatan Seni Budaya				
2	1	2	3	18	Belanja Modal Gedung/Bangunan				

2	1	2	3	19		Belanja Modal Jalan Desa				
2	1	2	3	20		Belanja Modal Jembatan Desa/ gorong-Gorong				
2	1	2	3	21		Belanja Modal Jaringan Pengairan dan Drainase				
2	1	2	3	22		Belanja Modal Jaringan Air Bersih				
2	1	2	3	23		Belanja Modal Talud/Urap/Bronjong/Bangket				
2	1	2	3	24		Belanja Modal Penerangan				
2	1	2	3	25		Belanja Modal Instalasi Listrik, Internet dan Telepon				
2	1	2	3	26		Belanja Modal Instalasi Pengolah Sampah				
2	1	2	3	27		Belanja Modal Buku dan Kepustakaan				
2	1	2	3	28		Belanja Modal Hewan/Ternak				
2	1	2	3	29		Belanja Modal Tanaman				
2	1	2	3	30		Lain-lain Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Kegiatan Operasional Perkantoran BPD</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>Kegiatan Operasional Pedukuhan</b>				

2	1	4	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	1	4	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
2	1	5				<b>Kegiatan Operasional RW</b>				
2	1	5	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	1	5	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
2	1	6				<b>Kegiatan Operasional RT</b>				
2	1	6	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	1	6	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				

2	1	7				Kegiatan .....				
2	1	8				Kegiatan .....				
2	2					Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1				Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Bangunan				
2	2	1	2			Belanja Barang dan Jasa				
						.....				
						.....				
2	2	1	3			Belanja Modal				
						.....				
						.....				
2	2	2				Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor Desa				
2	2	2	2			Belanja Barang dan Jasa				
						.....				
						.....				
2	2	2	3			Belanja Modal				
						.....				
						.....				

2	2	3				<b>Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Balai Desa/Pendopo</b>				
2	2	3	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	2	3	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
2	2	4				<b>Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Pendukung Kantor Desa</b>				
2	2	4	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	2	4	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
2	2	5				<b>Kegiatan Pembangunan Obyek Wisata Desa</b>				
2	2	5	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				

						.....				
2	2	5	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
2	2	6				<b>Kegiatan .....</b>				
2	2	7				<b>Kegiatan .....</b>				
2	3					<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>				
2	3	1				<b>Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa</b>				
2	3	1	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	3	1	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
2	3	2				<b>Kegiatan Pembinaan Perlindungan Masyarakat</b>				
2	3	2	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				

						.....				
2	3	2	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
2	3	3				<b>Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</b>				
2	3	3	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	3	3	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
2	3	4				<b>Kegiatan Pembinaan Pencegahan Kenakalan Remaja</b>				
2	3	4	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	3	4	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				



2	3	5				<b>Kegiatan Pembinaan Penyalahgunaan Bahan Kimia Berbahaya dan Napza</b>				
2	3	5	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	3	5	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
2	3	6				<b>Kegiatan .....</b>				
2	3	7				<b>Kegiatan .....</b>				
2	4					<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>				
2	4	1				<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa</b>				
2	4	1	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	4	1	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				

2	4	2				<b>Kegiatan Pembinaan/Penyuluhan/Sosialisasi bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa</b>				
2	4	2	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	4	2	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
2	4	3				<b>Kegiatan pelatihan usaha ekonomi Produktif</b>				
2	4	3	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	4	3	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
2	4	4				<b>Kegiatan pelatihan usaha pertanian</b>				
2	4	4	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	4	4	3			<b>Belanja Modal</b>				

						.....				
						.....				
2	4	5				<b>Kegiatan pelatihan usaha perikanan</b>				
2	4	5	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	4	5	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
2	4	6				<b>Kegiatan .....</b>				
2	4	7				<b>Kegiatan .....</b>				
2	5					<b>Belanja Tidak Terduga</b>				
2	5	1				<b>Kegiatan Penanganan Bencana Alam</b>				
2	5	2				<b>Kegiatan Penanganan Bencana Sosial</b>				
2	5	3				<b>Kegiatan Penanganan Kejadian Luar Biasa/Wabah</b>				
						<b>JUMLAH BELANJA</b>				
						<b>SURPLUS / DEFISIT (Jumlah Pendapatan - Jumlah Belanja)</b>				

<b>3</b>						<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>3</b>	<b>1</b>					<b><i>Penerimaan Pembiayaan</i></b>				
3	1	1				SILPA				
3	1	2				Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3				Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan				
						<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
<b>3</b>	<b>2</b>					<b><i>Pengeluaran Pembiayaan</i></b>				
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2				Penyertaan Modal Desa				
						<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
						<b>SELISIH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				

....., .....

KEPALA DESA .....

(.....)

**C. CONTOH PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN APB DESA**



KEPALA DESA .....  
KABUPATEN .....

PERATURAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN.....

T E N T A N G

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ....., (nama desa, huruf kapital semua)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah  
Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang  
Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan  
realisasi pelaksanaan APB Desa dan pertanggungjawaban  
pelaksanaan APB Desa kepada Bupati;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang  
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan  
Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawatan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
16. *Peraturan lainnya yang terkait .....*

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....(nama desa, huruf kapital semua)  
dan  
KEPALA DESA ..... (nama desa, huruf kapital semua)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... dengan rincian  
sebagai berikut:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Pendapatan Desa                          | Rp.....        |
| 2. Belanja Desa                             |                |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa   | Rp.....        |
| b. Bidang Pembangunan                       | Rp.....        |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan          | Rp.....        |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat           | Rp.....        |
| e. Bidang Tak Terduga                       | Rp.....        |
| Jumlah Belanja <b>(a+b+c+d+e)</b>           | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/Defisit <b>(Pendapatan-Belanja)</b> | <u>Rp.....</u> |
| 3. Pembiayaan Desa                          |                |
| a. Penerimaan Pembiayaan                    | Rp.....        |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                   | Rp.....        |
| Selisih Pembiayaan <b>(a-b)</b>             | <u>Rp.....</u> |

Pasal 2

Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....  
dengan rincian sebagai berikut:

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Pendapatan Desa                        | Rp..... |
| 2. Belanja Desa                           |         |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp..... |
| b. Bidang Pembangunan                     | Rp..... |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan        | Rp..... |

d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....	
e.	Bidang Tak Terduga	Rp.....	
	Jumlah Belanja <b>(a+b+c+d+e)</b>		<u>Rp.....</u>
	Surplus/Defisit <b>(Pendapatan-Belanja)</b>		<u>Rp.....</u>
3.	Pembiayaan Desa		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.....	
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.....	
	Selisih Pembiayaan <b>(a-b)</b>		<u>Rp.....</u>

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran .....;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember .....; dan
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa Tahun Anggaran .....

.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Desa.....

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

KEPALA DESA .....

.....



Diundangkan di .....  
pada tanggal .....  
SEKRETARIS DESA .....

.....

LEMBARAN DESA ..... TAHUN ..... NOMOR .....

LAMPIRAN I PERATURAN DESA.....  
NOMOR : ....TAHUN...  
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .....

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING						URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ KURANG	KETERANGAN
1						2	3	4	5	6
1						PENDAPATAN DESA				
1	1					Pendapatan Asli Desa				
1	1	1				Hasil Usaha				
1	1	1	1			Hasil Badan Usaha Milik Desa				
1	1	1	2			Hasil Badan Usaha Milik Desa Bersama				
1	1	1	3			Lain-lain Hasil Usaha Desa				
1	1	2				Hasil Aset				
1	1	2	1			Hasil Tanah Milik Desa				
1	1	2	2			Hasil Pasar Desa				
1	1	2	3			Hasil Pasar Hewan				

1	1	2	4			Hasil Tambatan Perahu				
1	1	2	5			Hasil Bangunan Desa				
1	1	2	6			Hasil Pelelangan Ikan				
1	1	2	7			Hasil Pelelangan Hasil Pertanian/Perkebunan/Perikanan/Peternakan				
1	1	2	8			Hasil Hutan Desa				
1	1	2	9			Hasil Mata Air Desa				
1	1	2	10			Hasil Pemandian Umum				
1	1	2	11			Hasil Lapangan Desa				
1	1	2	12			Hasil Jaringan Irigasi				
1	1	2	13			Lain-lain Hasil Aset Desa				
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong</b>				
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>Pendapatan Asli Desa yang sah lainnya</b>				
1	1	4	1			Pungutan Desa				
1	1	4	2			Hasil Tanah Kas Desa dari Hak Anggaduh				
1	1	4	3			Hasil/Bagi Hasil Sewa Pelungguh				
1	1	4	4			Hasil/Bagi Hasil Sewa Pengarem-Arem				
1	1	4	5			Bunga Bank Hasil Pelepasan Tanah dari Hak Anggaduh				
1	1	4	6			Bunga Bank dari Rekening Kas Desa dan Hasil Pelepasan Tanah Milik Desa				
1	1	4	7			Bunga Bank Pembentukan Dana Cadangan				
1	1	4	8			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				

<b>1</b>	<b>2</b>					<b>Pendapatan Transfer</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>Dana Desa</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>Bagi Hasil</b>				
1	2	2	1			Bagi Hasil Pajak Daerah				
1	2	2	2			Bagi Hasil Retribusi Daerah				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>Alokasi Dana Desa</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>				<b>Bantuan Keuangan</b>				
1	2	4	1			Bantuan Keuangan DIY				
1	2	4	1	1		Bantuan Keuangan Umum				
1	2	4	1	2		Bantuan Keuangan Khusus				
1	2	4	2			Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah				
1	2	4	2	1		Bantuan Keuangan Umum				
1	2	4	2	2		Bantuan Keuangan Khusus				
<b>1</b>	<b>3</b>					<b>Pendapatan Lain-lain</b>				
1	3	1				Hibah dan Sumbangan dari Pihak ketiga yang tidak mengikat				
1	3	2				Hasil kerjasama dengan pihak ketiga				
1	3	3				Bantuan dari perusahaan yang berlokasi di Desa				
1	3	4				Pengembalian kelebihan belanja				
1	3	5				Pengembalian tuntutan ganti rugi				

1	3	6				Pendapatan hadiah				
1	3	7				Hasil pelepasan tanah dari Hak Anggaduh				
1	3	8				Hasil pelepasan tanah milik Desa				
1	3	9				Hasil pelepasan aset Desa selain tanah				
1	3	10				Lain-lain Pendapatan Desa				
						<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>2</b>						<b>BELANJA</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>					<b><i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i></b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b><i>Kegiatan Pembayaran Penghasilan dan Tunjangan</i></b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b><i>Belanja Pegawai</i></b>				
2	1	1	1	1		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	2		Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangkopek				
2	1	1	1	3		Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	4		Tunjangan Suami/Istri				
2	1	1	1	5		Tunjangan Anak				
2	1	1	1	6		Tunjangan Kesehatan				
2	1	1	1	7		Tunjangan Penjabat Kepala Desa				

2	1	1	1	8		Tunjangan Pelaksana Tugas Harian Perangkat Desa				
2	1	1	1	9		Tunjangan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	10		Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	11		Jaminan Hari Tua Eks Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangkopek				
2	1	1	1	12		Santunan Kecelakaan/Kematian				
2	1	1	1	13		Santunan Duka				
2	1	1	1	14		Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa				
2	1	1	1	15		Penghargaan Purna Tugas Badan Permusyawaratan Desa				
2	1	1	1	16		Honorarium Bendahara Desa				
2	1	1	1	17		Honorarium Pembantu Bendahara Desa				
2	1	1	1	18		Honorarium Petugas Pengelola Aset Desa				
2	1	1	1	19		Honorarium Petugas Pemungut				
2	1	1	1	20		Honorarium Petugas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum				
2	1	1	1	21		Honorarium Tenaga Honorer Desa				
2	1	1	1	22		Lain-lain Belanja Pegawai				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>Kegiatan Operasional Perkantoran Pemerintah Desa</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				

2	1	2	2	1		Belanja Listrik/Air/Telepon/Surat Kabar/Fax/Internet (Jasa)				
2	1	2	2	2		Belanja Pajak Bumi dan Bangunan/Kendaraan Bermotor (Aset)				
2	1	2	2	3		Belanja Alat Tulis Kantor				
2	1	2	2	4		Belanja Benda Pos dan Materai				
2	1	2	2	5		Belanja Fotocopy/Cetak/Jilid/Penggandaan/rental				
2	1	2	2	6		Belanja Makanan dan Minuman				
2	1	2	2	7		Belanja Pakaian Dinas				
2	1	2	2	8		Belanja Bahan dan Material				
2	1	2	2	9		Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih				
2	1	2	2	10		Belanja Alat Kelistrikan, Baterai, dan Lampu				
2	1	2	2	11		Belanja Papan Informasi				
2	1	2	2	12		Belanja Sewa Pakaian				
2	1	2	2	13		Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan/Kendaraan				
2	1	2	2	14		Belanja Sewa Gedung/Tanah/Tempat/Ruangan				
2	1	2	2	15		Belanja Pemeliharaan/Servis/suku cadang Kendaraan Bermotor				
2	1	2	2	16		Belanja Pemeliharaan/servis Perlengkapan/Peralatan Kantor dan Rumah Tangga				
2	1	2	2	17		Belanja Pemeliharaan Bangunan/Taman/Sarana Prasarana Desa				

2	1	2	2	18		Belanja Honorarium Tim/Panitia				
2	1	2	2	19		Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Narasumber				
2	1	2	2	20		Belanja Transport peserta pembinaan/sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan				
2	1	2	2	21		Belanja uang saku pengiriman/penugasan Non Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	2	2	22		Belanja Uang Sidang Badan Permusyawaratan Desa				
2	1	2	2	23		Belanja Upah Tenaga Kerja				
2	1	2	2	24		Belanja Perjalanan Dinas				
2	1	2	2	25		Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat				
2	1	2	2	26		Belanja Jasa Sertifikasi				
2	1	2	2	27		Belanja Jasa Paket/Pengiriman				
2	1	2	2	28		Belanja Jasa Dekorasi dan Dokumentasi				
2	1	2	2	29		Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Bank)				
2	1	2	2	30		Belanja Jasa Pihak Ketiga				
2	1	2	2	31		Belanja BBM dan Gas				
2	1	2	2	32		Lain-lain Belanja Barang dan Jasa				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>Belanja Modal</b>				
2	1	2	3	1		Belanja Modal Tanah Pengganti				
2	1	2	3	2		Belanja Modal Tanah Bangunan Kantor				
2	1	2	3	3		Belanja Modal Tanah Rumah Dinas				



2	1	2	3	4		Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan				
2	1	2	3	5		Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan				
2	1	2	3	6		Belanja Modal Tanah Sarana Umum				
2	1	2	3	7		Belanja Modal Peralatan Berat				
2	1	2	3	8		Belanja Modal Peralatan Angkutan/Kendaraan				
2	1	2	3	9		Belanja Modal Peralatan Bengkel/Pertukangan				
2	1	2	3	10		Belanja Modal Peralatan Ukur				
2	1	2	3	11		Belanja Modal Peralatan Pertanian/Perkebunan/Perikanan/Peternakan				
2	1	2	3	12		Belanja Modal Peralatan Kantor				
2	1	2	3	13		Belanja Modal Perlengkapan Kantor/Keamanan				
2	1	2	3	14		Belanja Modal Peralatan Rumah Tangga				
2	1	2	3	15		Belanja Modal Peralatan Studio/Audio				
2	1	2	3	16		Belanja Modal Peralatan Komunikasi/Dokumentasi				
2	1	2	3	17		Belanja Modal Peralatan Seni Budaya				
2	1	2	3	18		Belanja Modal Gedung/Bangunan				
2	1	2	3	19		Belanja Modal Jalan Desa				
2	1	2	3	20		Belanja Modal Jembatan Desa/gorong-Gorong				
2	1	2	3	21		Belanja Modal Jaringan Pengairan dan Drainase				
2	1	2	3	22		Belanja Modal Jaringan Air Bersih				
2	1	2	3	23		Belanja Modal Talud/Urap/Bronjong/Bangket				
2	1	2	3	24		Belanja Modal Penerangan				

2	1	2	3	25		Belanja Modal Instalasi Listrik, Internet dan Telepon				
2	1	2	3	26		Belanja Modal Instalasi Pengolah Sampah				
2	1	2	3	27		Belanja Modal Buku dan Kepustakaan				
2	1	2	3	28		Belanja Modal Hewan/Ternak				
2	1	2	3	29		Belanja Modal Tanaman				
2	1	2	3	30		Lain-lain Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Kegiatan Operasional Perkantoran BPD</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>Kegiatan Operasional Pedukuhan</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				

[illegible]

2	2	1				Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Bangunan				
2	2	1	2			Belanja Barang dan Jasa				
						.....				
						.....				
2	2	1	3			Belanja Modal				
						.....				
						.....				
2	2	2				Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor Desa				
2	2	2	2			Belanja Barang dan Jasa				
						.....				
						.....				
2	2	2	3			Belanja Modal				
						.....				
						.....				
2	2	3				Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Balai Desa/Pendopo				
2	2	3	2			Belanja Barang dan Jasa				
						.....				
						.....				

2	2	3	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
2	2	4				<b>Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Pendukung Kantor Desa</b>				
2	2	4	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	2	4	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
2	2	5				<b>Kegiatan Pembangunan Obyek Wisata Desa</b>				
2	2	5	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	2	5	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
2	2	6				<b>Kegiatan .....</b>				

2	2	7				Kegiatan .....				
2	3					Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
2	3	1				Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa				
2	3	1	2			Belanja Barang dan Jasa				
						.....				
						.....				
2	3	1	3			Belanja Modal				
						.....				
						.....				
2	3	2				Kegiatan Pembinaan Perlindungan Masyarakat				
2	3	2	2			Belanja Barang dan Jasa				
						.....				
						.....				
2	3	2	3			Belanja Modal				
						.....				
						.....				
2	3	3				Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban				

						<b>Masyarakat</b>				
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>				<b>Kegiatan Pembinaan Pencegahan Kenakalan Remaja</b>				
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>				<b>Kegiatan Pembinaan Penyalahgunaan Bahan Kimia Berbahaya dan Napza</b>				
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				

						.....				
2	3	6				<b>Kegiatan .....</b>				
2	3	7				<b>Kegiatan .....</b>				
2	4					<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>				
2	4	1				<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa</b>				
2	4	1	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	4	1	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
2	4	2				<b>Kegiatan Pembinaan/Penyuluhan/Sosialisasi bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa</b>				
2	4	2	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	4	2	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				



						.....				
2	4	3				<b>Kegiatan pelatihan usaha ekonomi Produktif</b>				
2	4	3	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	4	3	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
2	4	4				<b>Kegiatan pelatihan usaha pertanian</b>				
2	4	4	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	4	4	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
2	4	5				<b>Kegiatan pelatihan usaha perikanan</b>				
2	4	5	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	4	5	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				

						.....				
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>				<b>Kegiatan .....</b>				
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>				<b>Kegiatan .....</b>				
<b>2</b>	<b>5</b>					<b>Belanja Tidak Terduga</b>				
<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>				<b>Kegiatan Penanganan Bencana Alam</b>				
<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>				<b>Kegiatan Penanganan Bencana Sosial</b>				
<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>				<b>Kegiatan Penanganan Kejadian Luar Biasa/Wabah</b>				
						<b>JUMLAH BELANJA</b>				
						<b>SURPLUS / DEFISIT (Jumlah Pendapatan - Jumlah Belanja)</b>				
<b>3</b>						<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
3	1	1				SILPA				
3	1	2				Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3				Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan				
						<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
<b>3</b>	<b>2</b>					<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan				

3	2	2				Penyertaan Modal Desa				
						<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
						<b>PEMBIAYAAN NETTO (Penerimaan Pembiayaan – Pengeluaran Pembiayaan)</b>				
						<b>SILPA TAHUN BERJALAN (selisih antara PEMBIAYAAN NETTO dengan hasil SURPLUS/ DEFISIT)</b>				

....., .....

KEPALA DESA .....

(.....)

LAMPIRAN II PERATURAN DESA.....  
NOMOR : .....TAHUN.....  
TENTANG : LAPORAN KEKAYAAN MILIK  
DESA SAMPAI DENGAN 31  
DESEMBER .....

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER .....

URAIAN				TAHUN N	TAHUN N-1
				(Tahun Periode Pelaporan)	(Tahun Sebelumnya)
1				2	3
I.	ASET DESA				
	A	ASET LANCAR			
		1	Kas Desa		
			a   Uang kas di Bendahara Desa		
			b   Rekening Kas Desa		
		2	Piutang		
			a   Piutang Sewa Tanah		
			b   Piutang Sewa Gedung		
			c   dst.....		
		3	Persediaan		
			a   Kertas Segel		
			b   Materai		
			c   dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR					
	B	ASET TIDAK LANCAR			
		1	Investasi Permanen		
			Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
		2	Aset Tetap		
			a   Tanah		
			b   Peralatan dan Mesin		
			c   Gedung dan bangunan		
			d   Jalan, Jaringan dan Instalasi		
			e   dst.....		

		3	Dana Cadangan		
			Dana Cadangan		
		4	Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR					
JUMLAH ASET $(A + B)$					
II.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH( I – II )					

....., .....  
KEPALA DESA .....

(.....)

Penjelasan tabel:

1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.
3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkan kerjasama tersebut.
4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.
5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.
6. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.
8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

LAMPIRAN III PERATURAN DESA  
NOMOR .....TAHUN....  
TENTANG       PROGRAM       SEKTORAL       DAN  
PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Desa                       :   .....  
Kecamatan               :   .....  
Kabupaten               :   .....

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	VOLU ME	SATU AN	SUMBER DANA	JUM- LAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sub Total Jenis Kegiatan (1)						Rp.
	Sub Total Jenis Kegiatan (2)						Rp.
	Sub Total Jenis Kegiatan (3)						Rp.

	Sub Total (4)						Rp.
	Grand Total (1 s/d 4)						Rp.

....., .....

KEPALA DESA .....

(.....)

#### D. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

## BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ....

DAN

KEPALA DESA ....

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA .... (Nama Desa)

KECAMATAN ..... KABUPATEN ....

NOMOR : ...../KB/BPD/.....

NOMOR : ...../KB/PD/.....

TENTANG

..... (Judul Peraturan Desa)

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa .....

**MENYEPAKATI BERSAMA :**

Rancangan Peraturan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kulon Progo  
tentang ....

MENJADI

Peraturan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kulon Progo tentang .....

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa ....., Kecamatan ...., Kabupaten Kulon Progo dan Kepala Desa ....., Kecamatan ...., Kabupaten Kulon Progo.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA .....

KEPALA DESA .....

.....

.....



E.    **FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA ..... KECAMATAN .....

TAHUN ANGGARAN .....

1.    Bidang                                :
2.    Kegiatan                                :
3.    Waktu Pelaksanaan    :
4.    Rincian Pendanaan    :

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH (Rp.)					

....., tanggal .....

Disetujui/mengesahkan  
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

*Cara pengisian :*

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.*
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APB Desa.*
- 3. kolom 1 diisi dengan nomor urut*
- 4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.*
- 5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/ barang.*
- 6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/ barang*
- 7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.*

F.    **FORMAT PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA ..... KECAMATAN .....

TAHUN ANGGARAN .....

1. Bidang : .....
2. Kegiatan : .....
3. Waktu Pelaksanaan : .....
4. Alasan perubahan : .....
5. Rincian Pendanaan :

KODE REKE NING	URAI AN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BER TAM BAH/ BER KUR ANG
		VOL UME	SATU AN	HAR GA SAT UAN (Rp.)	JUM LAH (Rp.)	VOLU ME	SAT UAN	HAR GA SAT UAN (Rp.)	JUM LAH (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JUMLAH (Rp.)										

....., tanggal .....

Disetujui/mengesahkan  
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

G.    **FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

- 1.    Bidang        :    .....
- 2.    Kegiatan     :    .....

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)		NO MOR BUK TI	PENGELUA RAN (RP.)		JUMLAH PENGEM BALIAN KE BENDA HARA	SAL DO KAS (RP.)
			DARI BEN DAHA RA	SWADA YA MASYA RAKAT		BE LANJ A BA RA NG DAN JA SA	BE LAN JA MO DAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan jumlah dari halaman sebelumnya							
		Jumlah							
		Total Penerimaan				Total Pengeluaran			
						Total Pengeluaran + Saldo Kas			

....., tanggal .....

Pelaksana Kegiatan

.....

*Cara pengisian:*

- 1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.*
- 2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APB Desa.*
- 3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.*
- 4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.*
- 5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.*
- 6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.*
- 7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.*
- 8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.*
- 9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.*
- 10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.*
- 11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.*
- 12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.*

H.   **FORMAT LAPORAN REALISASI   PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)**

1.   LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA SEMESTER   PERTAMA  
PEMERINTAH DESA.....  
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING						URAIAN	ANGGARAN  (Rp.)	REALISASI  (Rp.)	LEBIH/ KURANG  (Rp.)	KETE RANGAN
1						2	3	4	5	6
1						PENDAPATAN DESA				
1	1					Pendapatan Asli Desa				
1	1	1				Hasil Usaha				
1	1	1	1			Hasil Badan Usaha Milik Desa				
1	1	1	2			Hasil Badan Usaha Milik Desa Bersama				
1	1	1	3			Lain-lain Hasil Usaha Desa				
1	1	2				Hasil Aset				
1	1	2	1			Hasil Tanah Milik Desa				
1	1	2	2			Hasil Pasar Desa				

1	1	2	3		Hasil Pasar Hewan				
1	1	2	4		Hasil Tambatan Perahu				
1	1	2	5		Hasil Bangunan Desa				
1	1	2	6		Hasil Pelelangan Ikan				
1	1	2	7		Hasil Pelelangan Hasil Pertanian/Perkebunan/Perikanan/Peternakan				
1	1	2	8		Hasil Hutan Desa				
1	1	2	9		Hasil Mata Air Desa				
1	1	2	10		Hasil Pemandian Umum				
1	1	2	11		Hasil Lapangan Desa				
1	1	2	12		Hasil Jaringan Irigasi				
1	1	2	13		Lain-lain Hasil Aset Desa				
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong</b>				
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>			<b>Pendapatan Asli Desa yang sah lainnya</b>				
1	1	4	1		Pungutan Desa				
1	1	4	2		Hasil Tanah Kas Desa dari Hak Anggaduh				
1	1	4	3		Hasil/Bagi Hasil Sewa Pelungguh				
1	1	4	4		Hasil/Bagi Hasil Sewa Pengarem-Arem				
1	1	4	5		Bunga Bank Hasil Pelepasan Tanah dari Hak Anggaduh				
1	1	4	6		Bunga Bank dari Rekening Kas Desa dan Hasil Pelepasan Tanah Milik Desa				

1	1	4	7			Bunga Bank Pembentukan Dana Cadangan				
1	1	4	8			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
<b>1</b>	<b>2</b>					<b>Pendapatan Transfer</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>Dana Desa</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>Bagi Hasil</b>				
1	2	2	1			Bagi Hasil Pajak Daerah				
1	2	2	2			Bagi Hasil Retribusi Daerah				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>Alokasi Dana Desa</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>				<b>Bantuan Keuangan</b>				
1	2	4	1			Bantuan Keuangan DIY				
1	2	4	1	1		Bantuan Keuangan Umum				
1	2	4	1	2		Bantuan Keuangan Khusus				
1	2	4	2			Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah				
1	2	4	2	1		Bantuan Keuangan Umum				
1	2	4	2	2		Bantuan Keuangan Khusus				
<b>1</b>	<b>3</b>					<b>Pendapatan Lain-lain</b>				
1	3	1				Hibah dan Sumbangan dari Pihak ketiga yang tidak mengikat				
1	3	2				Hasil kerjasama dengan pihak ketiga				
1	3	3				Bantuan dari perusahaan yang berlokasi di Desa				



1	3	4				Pengembalian kelebihan belanja				
1	3	5				Pengembalian tuntutan ganti rugi				
1	3	6				Pendapatan hadiah				
1	3	7				Hasil pelepasan tanah dari Hak Anggaduh				
1	3	8				Hasil pelepasan tanah milik Desa				
1	3	9				Hasil pelepasan aset Desa selain tanah				
1	3	10				Lain-lain Pendapatan Desa				
						<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>2</b>						<b>BELANJA</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>					<b><i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i></b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b><i>Kegiatan Pembayaran Penghasilan dan Tunjangan</i></b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b><i>Belanja Pegawai</i></b>				
2	1	1	1	1		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	2		Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangkopek				
2	1	1	1	3		Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	4		Tunjangan Suami/Istri				

2	1	1	1	5		Tunjangan Anak					
2	1	1	1	6		Tunjangan Kesehatan					
2	1	1	1	7		Tunjangan Penjabat Kepala Desa					
2	1	1	1	8		Tunjangan Pelaksana Tugas Harian Perangkat Desa					
2	1	1	1	9		Tunjangan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa					
2	1	1	1	10		Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					
2	1	1	1	11		Jaminan Hari Tua Eks Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangkopek					
2	1	1	1	12		Santunan Kecelakaan/Kematian					
2	1	1	1	13		Santunan Duka					
2	1	1	1	14		Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa					
2	1	1	1	15		Penghargaan Purna Tugas Badan Permusyawaratan Desa					
2	1	1	1	16		Honorarium Bendahara Desa					
2	1	1	1	17		Honorarium Pembantu Bendahara Desa					
2	1	1	1	18		Honorarium Petugas Pengelola Aset Desa					
2	1	1	1	19		Honorarium Petugas Pemungut					
2	1	1	1	20		Honorarium Petugas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum					
2	1	1	1	21		Honorarium Tenaga Honorer Desa					
2	1	1	1	22		Lain-lain Belanja Pegawai					

<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>Kegiatan Operasional Perkantoran Pemerintah Desa</b>			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
2	1	2	2	1		Belanja Listrik/Air/Telepon/Surat Kabar/Fax/Internet (Jasa)			
2	1	2	2	2		Belanja Pajak Bumi dan Bangunan/Kendaraan Bermotor (Aset)			
2	1	2	2	3		Belanja Alat Tulis Kantor			
2	1	2	2	4		Belanja Benda Pos dan Materai			
2	1	2	2	5		Belanja Fotocopy/Cetak/Jilid/Penggandaan/rental			
2	1	2	2	6		Belanja Makanan dan Minuman			
2	1	2	2	7		Belanja Pakaian Dinas			
2	1	2	2	8		Belanja Bahan dan Material			
2	1	2	2	9		Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih			
2	1	2	2	10		Belanja Alat Kelistrikan, Baterai, dan Lampu			
2	1	2	2	11		Belanja Papan Informasi			
2	1	2	2	12		Belanja Sewa Pakaian			
2	1	2	2	13		Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan/Kendaraan			
2	1	2	2	14		Belanja Sewa Gedung/Tanah/Tempat/Ruangan			
2	1	2	2	15		Belanja Pemeliharaan/Servis/suku cadang Kendaraan Bermotor			

2	1	2	2	16		Belanja Pemeliharaan/servis Perlengkapan/Peralatan Kantor dan Rumah Tangga				
2	1	2	2	17		Belanja Pemeliharaan Bangunan/Taman/Sarana Prasarana Desa				
2	1	2	2	18		Belanja Honorarium Tim/Panitia				
2	1	2	2	19		Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Narasumber				
2	1	2	2	20		Belanja Transport peserta pembinaan/sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan				
2	1	2	2	21		Belanja uang saku pengiriman/penugasan Non Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	2	2	22		Belanja Uang Sidang Badan Permusyawaratan Desa				
2	1	2	2	23		Belanja Upah Tenaga Kerja				
2	1	2	2	24		Belanja Perjalanan Dinas				
2	1	2	2	25		Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat				
2	1	2	2	26		Belanja Jasa Sertifikasi				
2	1	2	2	27		Belanja Jasa Paket/Pengiriman				
2	1	2	2	28		Belanja Jasa Dekorasi dan Dokumentasi				
2	1	2	2	29		Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Bank)				
2	1	2	2	30		Belanja Jasa Pihak Ketiga				
2	1	2	2	31		Belanja BBM dan Gas				

2	1	2	2	32		Lain-lain Belanja Barang dan Jasa				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>Belanja Modal</b>				
2	1	2	3	1		Belanja Modal Tanah Pengganti				
2	1	2	3	2		Belanja Modal Tanah Bangunan Kantor				
2	1	2	3	3		Belanja Modal Tanah Rumah Dinas				
2	1	2	3	4		Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan				
2	1	2	3	5		Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan				
2	1	2	3	6		Belanja Modal Tanah Sarana Umum				
2	1	2	3	7		Belanja Modal Peralatan Berat				
2	1	2	3	8		Belanja Modal Peralatan Angkutan/Kendaraan				
2	1	2	3	9		Belanja Modal Peralatan Bengkel/Pertukangan				
2	1	2	3	10		Belanja Modal Peralatan Ukur				
2	1	2	3	11		Belanja Modal Peralatan Pertanian/Perkebunan/Perikanan/Peternakan				
2	1	2	3	12		Belanja Modal Peralatan Kantor				
2	1	2	3	13		Belanja Modal Perlengkapan Kantor/Keamanan				
2	1	2	3	14		Belanja Modal Peralatan Rumah Tangga				
2	1	2	3	15		Belanja Modal Peralatan Studio/Audio				
2	1	2	3	16		Belanja Modal Peralatan Komunikasi/Dokumentasi				
2	1	2	3	17		Belanja Modal Peralatan Seni Budaya				
2	1	2	3	18		Belanja Modal Gedung/Bangunan				
2	1	2	3	19		Belanja Modal Jalan Desa				

2	1	2	3	20		Belanja Modal Jembatan Desa/gorong-Gorong				
2	1	2	3	21		Belanja Modal Jaringan Pengairan dan Drainase				
2	1	2	3	22		Belanja Modal Jaringan Air Bersih				
2	1	2	3	23		Belanja Modal Talud/Urap/Bronjong/Bangket				
2	1	2	3	24		Belanja Modal Penerangan				
2	1	2	3	25		Belanja Modal Instalasi Listrik, Internet dan Telepon				
2	1	2	3	26		Belanja Modal Instalasi Pengolah Sampah				
2	1	2	3	27		Belanja Modal Buku dan Kepustakaan				
2	1	2	3	28		Belanja Modal Hewan/Ternak				
2	1	2	3	29		Belanja Modal Tanaman				
2	1	2	3	30		Lain-lain Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Kegiatan Operasional Perkantoran BPD</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>Kegiatan Operasional Pedukuhan</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				

[illegible]

[illegible]



2	2	3				<i>Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Balai Desa/Pendopo</i>				
2	2	3	2			<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				
						.....				
						.....				
2	2	3	3			<i>Belanja Modal</i>				
						.....				
						.....				
2	2	4				<i>Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Pendukung Kantor Desa</i>				
2	2	4	2			<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				
						.....				
						.....				
2	2	4	3			<i>Belanja Modal</i>				
						.....				
						.....				
2	2	5				<i>Kegiatan Pembangunan Obyek Wisata Desa</i>				
2	2	5	2			<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				
						.....				
						.....				

2	2	5	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
2	2	6				<b>Kegiatan .....</b>				
2	2	7				<b>Kegiatan .....</b>				
2	3					<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>				
2	3	1				<b>Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa</b>				
2	3	1	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	3	1	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
2	3	2				<b>Kegiatan Pembinaan Perlindungan Masyarakat</b>				
2	3	2	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				

2	3	2	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
2	3	3				<b>Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</b>				
2	3	3	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	3	3	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
2	3	4				<b>Kegiatan Pembinaan Pencegahan Kenakalan Remaja</b>				
2	3	4	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	3	4	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
2	3	5				<b>Kegiatan Pembinaan Penyalahgunaan Bahan Kimia Berbahaya dan Napza</b>				

<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>				<b>Kegiatan .....</b>				
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>				<b>Kegiatan .....</b>				
<b>2</b>	<b>4</b>					<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>				
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>				<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa</b>				
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>				<b>Kegiatan Pembinaan/Penyuluhan/Sosialisasi bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan</b>				

[illegible]

2	4	5				<i>Kegiatan pelatihan usaha perikanan</i>				
2	4	5	2			<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				
						.....				
						.....				
2	4	5	3			<i>Belanja Modal</i>				
						.....				
						.....				
2	4	6				<i>Kegiatan .....</i>				
2	4	7				<i>Kegiatan .....</i>				
2	5					<i>Belanja Tidak Terduga</i>				
2	5	1				<i>Kegiatan Penanganan Bencana Alam</i>				
2	5	2				<i>Kegiatan Penanganan Bencana Sosial</i>				
2	5	3				<i>Kegiatan Penanganan Kejadian Luar Biasa/Wabah</i>				
						<b>JUMLAH BELANJA</b>				
						<b>SURPLUS / DEFISIT (Jumlah Pendapatan - Jumlah Belanja)</b>				
3						<b>PEMBIAYAAN</b>				
3	1					<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				

3	1	1				SILPA				
3	1	2				Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3				Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan				
						<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
<b>3</b>	<b>2</b>					<b><i>Pengeluaran Pembiayaan</i></b>				
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2				Penyertaan Modal Desa				
						<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
						<b>SELISIH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				

....., .....

KEPALA DESA .....

(.....)

2. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER AKHIR TAHUN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA SEMESTER AKHIR TAHUN

PEMERINTAH DESA.....

TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KETE RANGAN
1					2	3	4	5	6
					PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA)				
1					PENDAPATAN DESA				
1	1				Pendapatan Asli Desa				
1	1	1			Hasil Usaha				
1	1	1	1		Hasil Badan Usaha Milik Desa				
1	1	1	2		Hasil Badan Usaha Milik Desa Bersama				
1	1	1	3		Lain-lain Hasil Usaha Desa				
1	1	2			Hasil Aset				
1	1	2	1		Hasil Tanah Milik Desa				
1	1	2	2		Hasil Pasar Desa				
1	1	2	3		Hasil Pasar Hewan				



1	1	2	4		Hasil Tambatan Perahu				
1	1	2	5		Hasil Bangunan Desa				
1	1	2	6		Hasil Pelelangan Ikan				
1	1	2	7		Hasil Pelelangan Hasil Pertanian/Perkebunan/Perikanan/Peternakan				
1	1	2	8		Hasil Hutan Desa				
1	1	2	9		Hasil Mata Air Desa				
1	1	2	10		Hasil Pemandian Umum				
1	1	2	11		Hasil Lapangan Desa				
1	1	2	12		Hasil Jaringan Irigasi				
1	1	2	13		Lain-lain Hasil Aset Desa				
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b><i>Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong</i></b>				
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>			<b><i>Pendapatan Asli Desa yang sah lainnya</i></b>				
1	1	4	1		Pungutan Desa				
1	1	4	2		Hasil Tanah Kas Desa dari Hak Anggaduh				
1	1	4	3		Hasil/Bagi Hasil Sewa Pelungguh				
1	1	4	4		Hasil/Bagi Hasil Sewa Pengarem-Arem				
1	1	4	5		Bunga Bank Hasil Pelepasan Tanah dari Hak Anggaduh				
1	1	4	6		Bunga Bank dari Rekening Kas Desa dan Hasil Pelepasan Tanah Milik Desa				
1	1	4	7		Bunga Bank Pembentukan Dana Cadangan				

1	1	4	8		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
<b>1</b>	<b>2</b>				<b>Pendapatan Transfer</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Dana Desa</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Bagi Hasil</b>				
1	2	2	1		Bagi Hasil Pajak Daerah				
1	2	2	2		Bagi Hasil Retribusi Daerah				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>Alokasi Dana Desa</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>			<b>Bantuan Keuangan</b>				
1	2	4	1		Bantuan Keuangan DIY				
1	2	4	1	1	Bantuan Keuangan Umum				
1	2	4	1	2	Bantuan Keuangan Khusus				
1	2	4	2		Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah				
1	2	4	2	1	Bantuan Keuangan Umum				
1	2	4	2	2	Bantuan Keuangan Khusus				
<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Pendapatan Lain-lain</b>				
1	3	1			Hibah dan Sumbangan dari Pihak ketiga yang tidak mengikat				
1	3	2			Hasil kerjasama dengan pihak ketiga				
1	3	3			Bantuan dari perusahaan yang berlokasi di Desa				
1	3	4			Pengembalian kelebihan belanja				

1	3	5			Pengembalian tuntutan ganti rugi				
1	3	6			Pendapatan hadiah				
1	3	7			Hasil pelepasan tanah dari Hak Anggaduh				
1	3	8			Hasil pelepasan tanah milik Desa				
1	3	9			Hasil pelepasan aset Desa selain tanah				
1	3	10			Lain-lain Pendapatan Desa				
					<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>2</b>					<b>BELANJA</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>				<b><i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i></b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b><i>Kegiatan Pembayaran Penghasilan dan Tunjangan</i></b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b><i>Belanja Pegawai</i></b>				
2	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	2	Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangkopek				
2	1	1	1	3	Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	4	Tunjangan Suami/Istri				
2	1	1	1	5	Tunjangan Anak				
2	1	1	1	6	Tunjangan Kesehatan				

2	1	1	1	7	Tunjangan Penjabat Kepala Desa				
2	1	1	1	8	Tunjangan Pelaksana Tugas Harian Perangkat Desa				
2	1	1	1	9	Tunjangan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	10	Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	11	Jaminan Hari Tua Eks Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangkopek				
2	1	1	1	12	Santunan Kecelakaan/Kematian				
2	1	1	1	13	Santunan Duka				
2	1	1	1	14	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa				
2	1	1	1	15	Penghargaan Purna Tugas Badan Permusyawaratan Desa				
2	1	1	1	16	Honorarium Bendahara Desa				
2	1	1	1	17	Honorarium Pembantu Bendahara Desa				
2	1	1	1	18	Honorarium Petugas Pengelola Aset Desa				
2	1	1	1	19	Honorarium Petugas Pemungut				
2	1	1	1	20	Honorarium Petugas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum				
2	1	1	1	21	Honorarium Tenaga Honorer Desa				
2	1	1	1	22	Lain-lain Belanja Pegawai				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>Kegiatan Operasional Perkantoran Pemerintah</b>				

					<b>Desa</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
2	1	2	2	1	Belanja Listrik/Air/Telepon/Surat Kabar/Fax/Internet (Jasa)				
2	1	2	2	2	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan/Kendaraan Bermotor (Aset)				
2	1	2	2	3	Belanja Alat Tulis Kantor				
2	1	2	2	4	Belanja Benda Pos dan Materai				
2	1	2	2	5	Belanja Fotocopy/Cetak/Jilid/Penggandaan/rental				
2	1	2	2	6	Belanja Makanan dan Minuman				
2	1	2	2	7	Belanja Pakaian Dinas				
2	1	2	2	8	Belanja Bahan dan Material				
2	1	2	2	9	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih				
2	1	2	2	10	Belanja Alat Kelistrikan, Baterai, dan Lampu				
2	1	2	2	11	Belanja Papan Informasi				
2	1	2	2	12	Belanja Sewa Pakaian				
2	1	2	2	13	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan/Kendaraan				
2	1	2	2	14	Belanja Sewa Gedung/Tanah/Tempat/Ruangan				
2	1	2	2	15	Belanja Pemeliharaan/Servis/suku cadang Kendaraan Bermotor				
2	1	2	2	16	Belanja Pemeliharaan/servis Perlengkapan/Peralatan Kantor dan Rumah Tangga				

2	1	2	2	17	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Taman/Sarana Prasarana Desa				
2	1	2	2	18	Belanja Honorarium Tim/Panitia				
2	1	2	2	19	Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Narasumber				
2	1	2	2	20	Belanja Transport peserta pembinaan/sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan				
2	1	2	2	21	Belanja uang saku pengiriman/penugasan Non Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	2	2	22	Belanja Uang Sidang Badan Permusyawaratan Desa				
2	1	2	2	23	Belanja Upah Tenaga Kerja				
2	1	2	2	24	Belanja Perjalanan Dinas				
2	1	2	2	25	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat				
2	1	2	2	26	Belanja Jasa Sertifikasi				
2	1	2	2	27	Belanja Jasa Paket/Pengiriman				
2	1	2	2	28	Belanja Jasa Dekorasi dan Dokumentasi				
2	1	2	2	29	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Bank)				
2	1	2	2	30	Belanja Jasa Pihak Ketiga				
2	1	2	2	31	Belanja BBM dan Gas				
2	1	2	2	32	Lain-lain Belanja Barang dan Jasa				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>Belanja Modal</b>				

2	1	2	3	1	Belanja Modal Tanah Pengganti				
2	1	2	3	2	Belanja Modal Tanah Bangunan Kantor				
2	1	2	3	3	Belanja Modal Tanah Rumah Dinas				
2	1	2	3	4	Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan				
2	1	2	3	5	Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan				
2	1	2	3	6	Belanja Modal Tanah Sarana Umum				
2	1	2	3	7	Belanja Modal Peralatan Berat				
2	1	2	3	8	Belanja Modal Peralatan Angkutan/Kendaraan				
2	1	2	3	9	Belanja Modal Peralatan Bengkel/Pertukangan				
2	1	2	3	10	Belanja Modal Peralatan Ukur				
2	1	2	3	11	Belanja Modal Peralatan Pertanian/Perkebunan/Perikanan/Peternakan				
2	1	2	3	12	Belanja Modal Peralatan Kantor				
2	1	2	3	13	Belanja Modal Perlengkapan Kantor/Keamanan				
2	1	2	3	14	Belanja Modal Peralatan Rumah Tangga				
2	1	2	3	15	Belanja Modal Peralatan Studio/Audio				
2	1	2	3	16	Belanja Modal Peralatan Komunikasi/Dokumentasi				
2	1	2	3	17	Belanja Modal Peralatan Seni Budaya				
2	1	2	3	18	Belanja Modal Gedung/Bangunan				
2	1	2	3	19	Belanja Modal Jalan Desa				
2	1	2	3	20	Belanja Modal Jembatan Desa/gorong-Gorong				
2	1	2	3	21	Belanja Modal Jaringan Pengairan dan Drainase				

2	1	2	3	22		Belanja Modal Jaringan Air Bersih				
2	1	2	3	23		Belanja Modal Talud/Urap/Bronjong/Bangket				
2	1	2	3	24		Belanja Modal Penerangan				
2	1	2	3	25		Belanja Modal Instalasi Listrik, Internet dan Telepon				
2	1	2	3	26		Belanja Modal Instalasi Pengolah Sampah				
2	1	2	3	27		Belanja Modal Buku dan Kepustakaan				
2	1	2	3	28		Belanja Modal Hewan/Ternak				
2	1	2	3	29		Belanja Modal Tanaman				
2	1	2	3	30		Lain-lain Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Kegiatan Operasional Perkantoran BPD</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>Kegiatan Operasional Pedukuhan</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				



<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>		<b>Belanja Modal</b>				
					.....				
					.....				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>Kegiatan Operasional RW</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
					.....				
					.....				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>		<b>Belanja Modal</b>				
					.....				
					.....				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>			<b>Kegiatan Operasional RT</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
					.....				
					.....				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>		<b>Belanja Modal</b>				
					.....				
					.....				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>			<b>Kegiatan .....</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>			<b>Kegiatan .....</b>				

2	2						Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2	2	1					Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Bangunan					
2	2	1	2				Belanja Barang dan Jasa					
							.....					
							.....					
2	2	1	3				Belanja Modal					
							.....					
							.....					
2	2	2					Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor Desa					
2	2	2	2				Belanja Barang dan Jasa					
							.....					
							.....					
2	2	2	3				Belanja Modal					
							.....					
							.....					
2	2	3					Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Balai Desa/Pendopo					

2	2	3	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					
						.....					
						.....					
2	2	3	3			<b>Belanja Modal</b>					
						.....					
						.....					
2	2	4				<b>Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Pendukung Kantor Desa</b>					
2	2	4	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					
						.....					
						.....					
2	2	4	3			<b>Belanja Modal</b>					
						.....					
						.....					
2	2	5				<b>Kegiatan Pembangunan Obyek Wisata Desa</b>					
2	2	5	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					
						.....					
						.....					
2	2	5	3			<b>Belanja Modal</b>					
						.....					

[illegible]

2	3	3				<b>Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</b>					
2	3	3	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					
						.....					
						.....					
2	3	3	3			<b>Belanja Modal</b>					
						.....					
						.....					
2	3	4				<b>Kegiatan Pembinaan Pencegahan Kenakalan Remaja</b>					
2	3	4	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					
						.....					
						.....					
2	3	4	3			<b>Belanja Modal</b>					
						.....					
						.....					
2	3	5				<b>Kegiatan Pembinaan Penyalahgunaan Bahan Kimia Berbahaya dan Napza</b>					
2	3	5	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					
						.....					
						.....					
2	3	5	3			<b>Belanja Modal</b>					

						.....				
						.....				
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>				<b>Kegiatan .....</b>				
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>				<b>Kegiatan .....</b>				
<b>2</b>	<b>4</b>					<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>				
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>				<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa</b>				
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>				<b>Kegiatan Pembinaan/Penyuluhan/Sosialisasi bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa</b>				
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				

2	4	2	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
2	4	3				<b>Kegiatan pelatihan usaha ekonomi Produktif</b>				
2	4	3	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	4	3	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
2	4	4				<b>Kegiatan pelatihan usaha pertanian</b>				
2	4	4	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	4	4	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
2	4	5				<b>Kegiatan pelatihan usaha perikanan</b>				
2	4	5	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				

[illegible]



3	2					<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2				Penyertaan Modal Desa				
						<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
						<b>SELISIH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				

....., .....

KEPALA DESA .....

(.....)

**I. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PTPKD**



KEPALA DESA .....  
KABUPATEN .....

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN.....

T E N T A N G

PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
TAHUN ANGGARAN .....

KEPALA DESA ....., (nama desa, huruf kapital semua)

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal....Peraturan Desa ..... Nomor ... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....., agar dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... dapat berjalan dengan tertib, terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ..... tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran .....

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawatan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
15. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri dari :
- a. Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
  - b. Kepala Seksi dan Kepala Urusan selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa; dan

c. Bendahara Desa.

KEDUA : Tugas Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa :

- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
- d. melakukan verifikasi terhadap pengajuan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa oleh Tim Pelaksana/Pengelola Desa;
- e. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
- f. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

KETIGA : Tugas Kepala Seksi dan Kepala Urusan selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa :

- a. membantu tugas Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- d. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
- e. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing urusan dan seksi untuk pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran ....., sebagai berikut :

- a. kegiatan yang dilaksanakan oleh Urusan ....., meliputi :
  1. ....

- 2 .....
- b. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Urusan ....., meliputi :
  1. ....
  - 2 .....
- c. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi ....., meliputi :
  1. ....
  - 2 .....
- d. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi ....., meliputi :
  1. ....
  - 2 .....
- e. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi ....., meliputi :
  1. ....
  - 2 .....

KELIMA : Bendahara Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tersendiri.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....(nama Desa)  
 pada tanggal.....(tanggal bulan tahun)  
 KEPALA DESA.....,

NAMA KEPALA DESA

## J. CONTOH KEPUTUSAN CAMAT TENTANG EVALUASI APB DESA



CAMAT ..... (Nama Kecamatan)  
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN CAMAT ..... (Nama Kecamatan)  
NOMOR ..... TAHUN .....

# TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ..... (Nama Desa)  
KECAMATAN ..... (Nama Kecamatan) TENTANG .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT .... (Nama Kecamatan),

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf .... (menyesuaikan) Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun ..... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa, Camat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang .... (sesuai judul);

Mengingat : 1. ....;

2. ....;

3. ....;

- 4. ....;
- 5. ....;
- 6. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa.....(Nama Desa) tentang ..... (menyesuaikan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang.....(menyesuaikan) berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
CAMAT ....., (Nama Kecamatan)

.....  
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT..... *(Nama Kecamatan)*  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ..... *(Nama Desa)* KECAMATAN ..... *(Nama Kecamatan)* TENTANG .....

No	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/ Perubahan APBDesa <i>(lihat tanggal keputusan )</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 3 hari setelah disepakati bersama. Peraturan Desa tentang APB Desa/ Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada atau Camat untuk dievaluasi



1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/ Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APB Desa/ Perubahan APB Desa	Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas ..... ..... ..... ..... .....					
<b>2</b>	<b>Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa</b>				
<b>2.1</b>	<b>Umum</b>				
2.1.1	Apakah Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa/ RKP Desa Perubahan tahun berkenaan			RKP Desa atau RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan			Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati dengan Pengelolaan Keuangan Desa	

Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah etimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.1.2	Apakah etimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasioal dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Perdes terkait PADesa (Misal Perdes tentang Pungutan,dll)	
2.1.3	Apakah etimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis			Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati dengan Pengelolaan Keuangan Desa	
Kesimpulan penilaian Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa bagian Pendapatan					
.....					
.....					

.....					
<b>2.3</b>	<b>Belanja</b>				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan			Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati dengan Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Peraturan Bupati tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1(satu) tahun anggaran (multiyear)			Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati dengan Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Operasional Pemerintah Desa 3. Tunjangan dan Operasional BPD 4. Insentif RT dan RW				
2.3.5	Penghasilan tetap, Tunjangan dan			Peraturan Bupati tentang ADD	

	penghasilan lainnya untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati			atau Peraturan Bupati tentang Penetapan penghasilan tetap tunjangan dan penghasilan lainnya untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT dan RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang ADD atau Peraturan Bupati tentang Penetapan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi Belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga Perkiraan Sendiri/HPS)			Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan tandarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten	
Kesimpulan penilaian Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa bagian Belanja ..... ..... ..... .....					
<b>2.4</b>	<b>Pembiayaan</b>				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah				

	sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUM Desa				
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUM Desa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil uji kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SILPA tahun anggaran sebelumnya telah digunakan seluruhnya				
Kesimpulan penilaian Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa bagian Pembiayaan ..... ..... .....					

..... ..... .....
Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi ..... .....
<div>CAMAT .....</div> <div>..... (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)</div>

Wates, 1 Oktober 2017

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO